



ANALISIS POTENSI PARIWISATA SYARIAH KABUPATEN PANGANDARAN MELALUI OPTIMALISASI INDUSTRI KREATIF

Oleh

Toneng Listiani^{*1}, Udayani Permaludin²

^{1,2}Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung ; Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru,
Kota Bandung, Jawa Barat 40614

E-mail:¹tonenglistiani@uinsgd.ac.id, ²udayani77@uinsgd.ac.id

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara muslim dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia sangat berpeluang menjadi pusat wisata halal dunia. Salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia yang diproyeksikan mencapai skala Internasional adalah Kabupaten Pangandaran. Pariwisata syariah di Kabupaten Pangandaran dapat dikembangkan melalui optimalisasi industri kreatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis makna pariwisata syariah bagi pelaku wisata, potensi pariwisata syariah di kabupaten Pangandaran, dan peran industri kreatif yang berkaitan dengan pariwisata Syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian meunjukkan Pariwisata syariah masih menjadi istilah yang asing bagi masyarakat dan pelaku wisata di Kabupaten Pangandaran, potensi pariwisata Syariah Kabupaten Pangandaran cukup besar ditinjau dari nilai luhur, budaya, dukungan dari masyarakat, aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan kelembagaan, Industry kreatif memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan, penyebaran informasi baik bagi masyarakat, wisatawan, maupun pihak yang memiliki kepentingan dalam pariwisata Syariah di Kabupaten Pangandaran.

Keywords: Analisis Potensi, Pariwisata Syariah, Industri Kreatif

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pariwisata syariah dunia yang kian pesat, mendorong banyak negara di dunia berlomba-lomba dalam menghadirkan konsep pariwisata syariah. Hal tersebut dilakukan mengingat kontribusi sektor pariwisata syariah yang begitu besar bagi perekonomian suatu negara. Menurut *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), kontribusi dari wisatawan muslim dunia mencapai 126 miliar dolar AS pada 2011.

Pemanfaatan ekonomi industri pariwisata syariah tak hanya dilakukan oleh negara muslim atau yang berpenduduk muslim tetapi juga dilakukan oleh negara-negara yang notabene berpenduduk muslim minoritas atau negara non muslim, seperti Korea Selatan,

Jepang, Thailand, dan beberapa negara di Eropa seperti Inggris dan Jerman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh MasterCard & CrescentRating tentang *Global Muslim Travel Index 2015*¹, bahwa di tahun 2014 terdapat 108 juta Muslim yang telah melakukan perjalanan. Hal tersebut merepresentasikan sekitar 10% dari total ekonomi wisata global. Wisatawan Muslim diprediksi akan meningkat menjadi 150 juta pada tahun 2020 dengan nilai ekonomi mencapai US\$200 milyar.

Indonesia sebagai salah satu negara muslim dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, sangat berpeluang menjadi pusat wisata halal dunia. Terlebih, menurut *Global Muslim Traveler*, Indonesia masuk



dalam 10 besar Negara dengan jumlah wisatawan muslim terbanyak di dunia.

Kondisi demikian semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang memiliki peluang tinggi dalam pengembangan pariwisata syariah. Pengembangan dan pemanfaatan ekonomi pariwisata syariah dapat diwujudkan melalui harmonisasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dengan membuat peraturan dan regulasi terkait mekanisme pelaksanaan pariwisata yang berbasis Islam.

Hal ini dilakukan karena pada prinsipnya investasi pada sektor pariwisata syariah dilakukan di daerah. Daerah yang akan menerima secara langsung investasi, seperti hotel, restaurant, transportasi, dan akomodasi yang selanjutnya biasa disebut industri kreatif dalam bidang pariwisata. Industri kreatif tumbuh seiring kemajuan pariwisata, baik pariwisata konvensional maupun pariwisata syariah.

Sapudin (dalam Rosi Wahyu Triana, 2017:3) memaparkan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf, telah mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata dan spa di 12 destinasi wisata syariah. Pengembangan tersebut dilakukan disekelompok kota yakni Aceh, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Salah satu destinasi wisata di Jawa Barat yang sudah berkembang adalah Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran diproyeksikan akan menjadi kabupaten unggul dalam pengembangan pariwisata baik skala nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pangandaran yang menyandang 2 (dua) status kawasan strategis, yaitu, kawasan strategis Provinsi Jawa Barat dan Kawasan Strategis Nasional. Ditambah Kebijakan pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai pusat perikanan dan pariwisata di Jawa Barat, Demikian yang dikemukakan oleh Kabid

Humas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran (Lilis, 15 Juli 2019).

Kebijakan tersebut menambah peluang dan potensi Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata syariah. Terlebih saat ini industri kreatif yang menopang kegiatan pariwisata di Kabupaten Pangandaran telah tersebar di kawasan wisata terutama kawasan wisata pantai Pangandaran dan kawasan wisata Batukaras. Hal lain yang menjadi modal dalam pengembangan pariwisata syariah adalah kegiatan keagamaan masyarakat yang masih cukup kental, seperti penyuluhan dan penanaman nilai-nilai agama oleh tokoh masyarakat dan tradisi yang masih cukup dilestarikan oleh masyarakat.

LANDASAN TEORI

1. Pariwisata Syariah

Menurut Kemenpar (dalam Andriana, 2015:18) pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Sedangkan menurut Sofyan (dalam Andriana, 2015:19) mengemukakan bahwa wisata syariah lebih luas cakupannya daripada wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah. Seperti yang diajukan oleh *World Tourism Organization* (WTO) konsumen wisata syariah bukan hanya untuk umat muslim saja tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.

2. Industri Kreatif

Simatupang (2007) mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, permainan, atau desain fashion, dan termasuk layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan.

Pelaku yang menjadi penggerak industri kreatif menurut Departemen Perdagangan (dalam Simatupang, 2007) adalah; cendekiawan, kesatuan organisasi bisnis dan pemerintah. Industri kreatif perlu



dikembangkan di Indonesia karena memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, membangun citra identitas, berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreatifitas, dan memberikan dampak sosial yang positif. Sedangkan yang menjadi pilar industri kreatif menurut Departemen Perdagangan (2008) adalah; individu, industri, teknologi, sumber daya, lembaga dan lembaga intermediasikeuangan.

Menurut Supangkat (2008:63) dalam pengembangan pariwisata memerlukan proses-proses yang kreatif. Tahapan proses yang baik dalam pengembangan ini meliputi perencanaan, promosi, paket dan perjalanan wisata, souvenir dan destinasi wisata itu sendiri. Tahapan ini memiliki aktifitas yang kaya akan ide dan kreasi sehingga industri pariwisata memiliki timbal balik dengan industri kreatif.

3. Potensi Wisata

Sendi, 2020 mengungkapkan bahwa potensi wisata merupakan obyek wisata yang memiliki daya Tarik untuk dikembangkan dan mendatangkan wisatawan. Sementara menurut supriadi & Roedjinandri, 2017 potensi wisata ialah hal-hal yang dimiliki destinasi wisata yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam industry wisata.

Potensi wisata dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: potensi alam, potensi kebudayaan dan potensi manusia.

1. Potensi Alam Potensi alam adalah keadaan dari jenis flora dan fauna suatu daerah bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dll (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan wisatawan untuk berkunjung ke daya tarik wisata tersebut.

2. Potensi kebudayaan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya mampu menciptakan deferensiasi dalam daya Tarik wisata. Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian,

peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monumen.

3. Potensi Manusia. Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian / pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah. Potensi manusia juga dapat menjadi sumber daya yang akan diikutsertakan dalam pengelolaan pariwisata.

4. Sistem Pariwisata

Pariwisata ditinjau dari berbagai aspeknya merupakan suatu sistem yang berintegrasi dan berinterelasi dengan sistem lainnya. Sistem ini menjadi satu kesatuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam industry pariwisata. Interelasi sistem ini menjadi kunci penting dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia dari sektor pariwisata.

Mill dan Morrison (1985) mengungkapkan, *"like a spider's web-touch one part of it and reverberations will be felt throughout"*. Dengan lain kata, pariwisata merupakan sistem dari berbagai unsur yang tersusun bagaikan sarang laba-laba yang tersusun rapih. Definisi ini juga diperkuat oleh Fannel (1999: 4) bahwa pariwisata dipandang sebagai sistem, yakni *"the interrelated system that includes tourits and the associated services that are provided and utilised (facilities, attractions, transportation, and accomodation) to aid in their movement"*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pariwisata merupakan suatu sistem yang kompleks yang didalamnya pelbagai komponen saling berkaitan dan saling menguatkan, sehingga dalam hal kebijakan kepariwisataan, pemerintah perlu mempertimbangkannya dari berbagai aspek kehidupan.

Priyadi (2016) menguraikan bahwa ada tiga elemen penting dalam sistem kepariwisataan, yakni (1) daerah asal atau origin, (2) daerah tujuan atau destination, dan (3) daerah antara atau routes perjalanan. Ketiga



elemen tersebut menjadi satu kesatuan dalam sistem pariwisata, sehingga fungsinya saling terkait juga satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode tersebut yaitu metode penelitian yang terfokus dalam mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara alami tanpa adanya intervensi suatu eksperimen atau perlakuan secara artifisial atau tiruan (Seligier, 2001). Artinya bahwa metode deskriptif berusaha menjelaskan suatu proses dalam penelitian dengan cara menggambarkan data yang diambil dari sejumlah sumber yang sangat mendukung. Berdasarkan penjelasan tersebut, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikembangkan berdasar pada data-data yang terkumpul di lokasi penelitian dan dari dokumen formal.

Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif-deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun hasil rekayasa manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Parigi. Kabupaten Pangandaran memiliki luas + 1.010 km² dan dapat dikatakan kabupaten yang baru terbentuk hasil dari pemekaran Kabupaten Ciamis dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Secara astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak pada 108°8'0" - 108°50'0" Bujur Timur dan 7°24'0" - 7°54'20" Lintang Selatan.

Sementara secara administratif, Kabupaten Pangandaran berbatasan dengan wilayah berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Cilacap

Kabupaten Pangandaran terbagi kedalam 10 (sepuluh) kecamatan dengan Kecamatan Langkaplancar sebagai kecamatan yang terluas yaitu 17.719 Ha, diikuti oleh Kecamatan Kalipucang 13.678 Ha, Kecamatan Padaherang 11.873 Ha, hingga kecamatan yang terkecil yaitu kecamatan Mangunjaya dengan luas 3.280 Ha.

Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan daerah prioritas pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat, menjadikan sector pariwisata sebagai sector utama dalam upaya pengembangan daerah disamping sector-sektor lain, seperti sector perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, pemanfaatan pariwisata dilakukan dengan mengembangkan kawasan ataupun desa-desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Diantaranya yang saat ini telah mengalami perkembangan pariwisata yang pesat adalah Kawasan Pantai Pangandaran dan Kawasan Pantai Batukaras.

Pemahaman Tentang Pariwisata Syariah bagi Pelaku Wisata di Kabupaten Pangandaran

Pariwisata syariah masih menjadi istilah yang asing bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran, bahkan bagi pelaku wisata itu sendiri. Fenomena tersebut terjadi karena istilah pariwisata syariah belum banyak digunakan di Kabupaten Pangandaran terutama dalam pengembangan pariwisata.

Pariwisata syariah dipandang sebagai suatu hal yang kaku, terbatas, dan hanya berfokus pada ritual agama. Padahal sejatinya pariwisata syariah memiliki cakupan yang



sangat kompleks. Mulai dari, kebijakan pemerintah, sistem manajemen pada dunia usaha, hingga pada tatanan teknis yang mengatur batasan halal haram dalam aktifitas wisata. Hal senada diungkapkan oleh Chookaew (2015) yang mendeskripsikan pariwisata syariah tidak hanya terfokus pada objek tetapi juga pada hal yang lebih luas yaitu fasilitas dan adab perjalanan.

Dalam pariwisata syariah, kegiatan wisata tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan senang-senang belaka, tetapi juga untuk mengatur dan memastikan masyarakat/wisatawan tetap berada pada koridor ajaran agama Islam dalam memenuhi kebutuhan hiburan.

Selain itu, Pengetahuan dan Pemahaman pariwisata syariah yang minim disebabkan oleh kurangnya penyuluhan dan edukasi dari pemerintah. Sementara dari sudut pandang wisatawan, keterbatasan informasi dan pelaku wisata yang berinteraksi dengan mereka belum memiliki pengetahuan mengenai pariwisata syariah.

Bagi pelaku wisata, pariwisata syariah masih asing selain karena informasi dan edukasi yang minim, juga disebabkan oleh kurangnya pembuatan program-program yang berkaitan dengan pariwisata syariah. Selama ini para pelaku wisata merasa belum menerima program dari pemerintah akan pariwisata syariah. Program yang ada masih sebatas pariwisata konvensional.

Potensi Pariwisata Syariah di Kabupaten Pangandaran

Secara garis besar masyarakat setuju dengan adanya pariwisata syariah di Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sudut pandang dari beberapa hal terhadap Pariwisata syariah, yaitu dari segi konsep, dari segi kebutuhan, dan dari segi kesesuaian pariwisata syariah dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

Masyarakat menilai, bahwa pariwisata syariah perlu diterapkan dalam kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran

mengingat ada kekhawatiran masyarakat akan pengaruh pariwisata terhadap kondisi social, budaya, dan agama masyarakat. Adanya wisatawan domestik dan wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran berinteraksi dan membawa pola budaya yang berbeda. Masyarakat mengkhawatirkan lunturnya nilai-nilai akibat dari aktifitas yang terjadi.

Selain itu, potensi pariwisata syariah di Kabupaten Pangandaran ditunjang oleh beberapa aspek yaitu;

a. Aksesibilitas (accessibility)

Kabupaten Pangandaran terus berbenah untuk memajukan sector pariwisata. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk perbaikan dan pembangunan jalan. Upaya tersebut tertuang dalam Renip tahun 2016. Dimana Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai komitmen untuk mencapai kemapanan infrastruktur dari segi aksesibilitas pada tahun 3035, melalui upaya:

1. Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencapai tujuan dengan memperbaiki akses jalan.
2. Peningkatan kualitas layanan untuk kenyamanan penumpang
3. Peningkatan fasilitas umum, seperti ruang tunggu, halte.
4. Dermaga, terminal, dan bandara dikelola secara berkelanjutan.
5. Membentuk moda transportasi terintegrasi agar memudahkan masyarakat dalam memilih alternative moda transportasi dalam mencapai tujuan pergerakan.

Oleh karena itu, Infrastruktur yang terdapat di Kabupaten Pangandaran secara garis besar tergolong baik. Jalan menuju dan jalan dalam kawasan wisata maupun kota kabupaten sudah dilakukan pelebaran, pengerasan dan dapat dilewati kendaraan roda empat maupun bus dan di beberapa titik sudah terdapat tanda penunjuk jalan sehingga wisatawan yang datang dari luar daerah atau luar kota cukup



mudah untuk menjangkau lokasi. Hal tersebut ditunjang dengan adanya 1 (satu) terminal kategori tipe B, yang terletak di Kecamatan Cijulang dan terminal yang terletak di Kecamatan Parigi dan Kecamatan Kalipucang dengan kategori tipe C sebanyak 4 terminal sebagai terminal penumpang.

Selanjutnya, untuk akses udara Kabupaten Pangandaran saat ini memiliki Bandar Udara Nusawiru yang terletak tak jauh dari pusat pemerintahan. Dalam perencanaannya, pesawat komersil yang dapat melayani di Bandar Udara Nusawiru terbagi dalam dua tahap, yakni sejenis pesawat Cessa B208B dengan kapasitas penumpang 12 (dua belas) orang pada tahap pertama. Dan jenis pesawat berkapasitas 50 (lima puluh) orang sejenis F- 50, ATR-42, Dash-8, dan MA-60.

Sementara untuk akses laut, terdapat 3 Pelabuhan yang saat ini masih beroperasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga dikabarkan akan me-reaktivasi rel kereta api lama yang berada di kawasan primer Pangandaran sebagai penunjang tambahan dalam menunjang kemudahan akses dari dan menuju Kabupaten Pangandaran. Namun demikian, infrastruktur yang terbangun belum dioptimalkan dengan baik terutama dari segi manajemen, *maintenance*, dan pengoperasian.

Akses teknologi informasi dan internet di Kabupaten Pangandaran sudah berkembang namun pemanfaatannya masih belum optimal, terutama bagi kawasan wisata dan wisatawan. Jaringan lain seperti saluran televisi dan radio sudah melingkupi Kabupaten Pangandaran.

b. Atraksi (Attraction)

Kabupaten Pangandaran mempunyai beberapa daya tarik seperti:

1. Wisata sejarah (Bunker Dan Gua Jepang, Stasiun Pangandaran)
2. Wisata Budaya (Ronggeng Gunung, Cagar Budaya Dayang Sumbi Tugu Pangeling-eling, wayang golek, degung dan calung)
3. Wisata Kuliner (dawet dewala, aneka makanan kering, ikan asin dan jambal roti,

minuman jus honje, opak, dan makanan awet)

4. Wisata Perikanan (perikanan laut (pelabuhan dan pelelangan ikan) dan perikanan darat (tambak ikan & udang))
5. Wisata Alam (wisata pantai dan mangrove)
6. *Home Industry* (ikan asin, olahan ikan, olahan tanaman mangrove).

Beberapa tempat yang menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara di Kabupaten Pangandaran, yaitu kawasan Pantai Pangandaran dan Pantai Batukaras. Secara umum, ada beberapa zona yang menjadi favorit yaitu zona dengan gelombang rendah, gelombang sedang, dan gelombang tinggi. Spot tersebut berada di tempat yang berbeda.

c. Amenitas (Amenity)

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten prioritas dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata diikuti oleh pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan inventarisasi Sarana dan prasarana yang saat ini ada, terutama pada kawasan wisata Pantai Pangandaran dan Batukaras, secara keseluruhan kondisi sarana dan prasarana sangat baik dan mendukung kegiatan pariwisata terutama di Kawasan Pantai Pangandaran.

Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut baru selesai dikembangkan secara massif dengan membangun berbagai fasilitas pendukung pariwisata. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sumber daya listrik, jaringan telekomunikasi, sumber air bersih, tempat ibadah (masjid, mushola), kios, kelontong, sarana kesehatan (Rumah Sakit, poliklinik, posyandu, apotek, tempat praktek dokter), tempat parkir, kamar mandi/toilet umum, warung makan, minimarket, spbu, percetakan/sablon, sarana akomodasi, pintu masuk/ shelter, gedung pertemuan.



Namun demikian, ada beberapa sarana prasarana yang kondisinya sudah tak layak dan masih perlu ditingkatkan khususnya di kawasan wisata Batukaras, seperti pengelolaan sampah, tempat sampah, pengaturan lokasi produk nelayan dan mobilitas nelayan.

d. Kelembagaan (Ancillary)

Sektor Pariwisata merupakan sector yang multidimensi sehingga dalam kegiatannya memerlukan sinergitas antar lembaga dan suatu kebijakan sebagai payung hukum. Oleh karena itu, factor kelembagaan menjadi sangat penting dalam pengembangan pariwisata sebagai pihak yang mempunyai kewenangan pembuat kebijakan dan pihak yang melaksanakan kebijakan.

Kabupaten Pangandaran sudah memiliki lembaga yang cukup baik sebagai potensi dalam pengembangan pariwisata syariah. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Dinas Pariwisata dan Budaya, Kemenag Kabupaten Pangandaran, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati lingkungan dan pariwisata, Kelompok Penggerak pariwisata, dan Pertahanan Sipil.

Sementara itu, dari segi pasar, pariwisata syariah mempunyai peluang yang besar seiring bertambahnya tingkat kesadaran kehalalan produk oleh masyarakat *middle class moslem* (Utomo, 2014).

Meskipun pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan para pelaku wisata di Kabupaten Pangandaran masih minim, namun secara keseluruhan masyarakat menyambut baik akan konsep pariwisata syariah. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kecintaan masyarakat pada budaya dan nilai luhur yang berkembang secara turun temurun dalam masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Selain itu, nilai-nilai agama yang mereka anut menjadi tolak ukur dalam aktifitas pariwisata yang berkembang saat ini. Masyarakat menginginkan adanya suatu konsep pariwisata yang tidak hanya dapat memberikan nilai ekonomi, tetapi juga dapat menjaga dan melestarikan nilai, norma dan

ajaran agama mereka. Oleh karena itu, pariwisata syariah dipandang sebagai solusi atas harapan mereka akan pariwisata dimasa yang akan datang.

Hal tersebut merupakan sebuah potensi yang baik dalam pengembangan pariwisata syariah mengingat para pelaku wisata dan masyarakat Kabupaten Pangandaran mempunyai harapan adanya kegiatan wisata yang bersifat Islami dan menjaga kearifan lokal serta nilai budaya yang dimiliki dan berkembang di masyarakat.

Peran Industri Kreatif dalam Pariwisata Syariah di Kabupaten Pangandaran

Kegiatan pariwisata tak terlepas dan sangat dipengaruhi industri kreatif sebagai komponen tak terpisahkan dalam keberhasilan pengembangan pariwisata. Hal tersebut karena pariwisata merupakan sector yang terdiri dari berbagai macam industry yang kemudian terbentuk dalam satu-kesatuan dan saling terkait; diantaranya industry akomodasi, transportasi, dan makanan-minuman.

Hal tersebut juga berlaku bagi pengembangan pariwisata syariah, dimana industry kreatif menjadi salah satu penunjang utama keberhasilan pengembangan pariwisata syariah. Proses cipta karya dalam industry kreatif yang menekankan pada kualitas daya pikir dan inovasi selaras dengan kebutuhan pariwisata syariah yang notabene memerlukan suatu pembaruan yang terkait dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pariwisata syariah menuntut peran yang lebih aktif bagi para wisatawan maupun bagi penyedia layanan. Kolaborasi kedua pihak tersebut menimbulkan interaksi yang berfokus pada aktivitas kreatif yang melibatkan transfer dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan kreatif akan pariwisata syariah sehingga tercipta *demand and supply* dalam system pariwisata syariah. Daya kreasi dan produk yang inovatif sangat relevan dengan kebutuhan pariwisata syariah akan khasanah pariwisata yang baru dengan konsep mengacu



pada nilai-nilai agama Islam dan bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, tetapi juga dalam hal mengubah tempat, mengubah pola kegiatan, dan mengubah paradigma berfikir masyarakat.

Sebagai contoh, penyediaan layanan bagi wisatawan dalam pariwisata syariah memerlukan sebuah kompetensi akan syariah Islam. Tour guide yang berinteraksi, harus memiliki kecakapan dalam pemanduan yang sesuai aturan syariah. Hal ini penting dilakukan sebagai bagian dari upaya edukasi pariwisata syariah mengingat, para wisatawan akan memperoleh informasi dan wawasan pariwisata syariah lebih banyak dari pemandu. Pada kawasan wisata, terdapat zonasi yang mengatur antara wisatawan laki-laki dan wisatawan perempuan. Pengaturan dan pembagian tersebut sebagai upaya dalam menjamin kenyamanan aktifitas wisatawan sesuai kaidah Islam. Tersedianya makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya bagi wisatawan. Produk spa dapat menyediakan layanan secara khusus pada pemisahan gender, produk kecantikan yang halal, juga pada cara berpakaian yang syar'i.

Pengembangan pariwisata syariah di Kabupaten Pangandaran akan lebih mudah dilakukan jika terbentuk opini yang baik di masyarakat. Keterbatasan informasi yang diterima masyarakat/wisatawan menjadikan makna pariwisata syariah dipahami secara sempit. Oleh karena itu, ketersediaan dan penyebaran informasi penting dilakukan diantaranya dengan Penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan media social serta pemberian insentif. Upaya ini dapat dilakukan oleh industry kreatif, mengingat dalam industry kreatif terdapat subsector yang terkait langsung dengan teknologi informasi, diantaranya periklanan, Publishing/Percetakan, desain komunikasi visual, dan televisi dan radio.

Industri kreatif memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan, penyebaran informasi baik bagi masyarakat, wisatawan,

maupun pihak yang memiliki kepentingan dalam pariwisata syariah.

Industry kreatif dan produk yang dihasilkan saat ini menjadi penunjang dalam pengembangan pariwisata syariah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat suatu kebijakan dan pola sinergitas antar pihak terkait dalam mengatur dan memanfaatkan produk industry kreatif.

PENUTUP

Kesimpulan

Pariwisata syariah masih menjadi istilah yang asing bagi masyarakat dan bagi pelaku wisata di Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut terjadi karena minimnya informasi dan edukasi bagi masyarakat, pelaku wisata, dan wisatawan; terlebih pariwisata syariah belum banyak dikembangkan di Indonesia terutama dalam pengembangan pariwisata suatu daerah.

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata syariah, hal ini ditunjukkan oleh 4 (empat) dimensi yang secara keseluruhan mendukung pengembangan pariwisata syariah, objek dan atraksi serta tempat bersejarah yang dimiliki saat ini dapat dikembangkan sebagai bagian dari langkah awal pengembangan pariwisata syariah di Kabupaten Pangandaran. Potensi lain yang tidak kalah penting adalah mengenai harapan masyarakat akan kegiatan pariwisata yang dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi nilai moral, budaya, dan agamanya.

Industry kreatif yang terdapat di Kabupaten Pangandaran menjadi faktor penunjang yang memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pariwisata syariah di Kabupaten Pangandaran.

Kajian pariwisata syariah diharapkan memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah tentang pariwisata syariah. Pemerintah kabupaten Pangandaran dapat menindaklanjuti dengan membuat pedoman pariwisata syariah sebagai



rekonstruksi pariwisata syariah yang meliputi sarana dan prasarana, makanan dan minuman serta pelayanan. Berdasarkan pedoman tersebut pelaku industri wisata dan masyarakat Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan pariwisata yang berlandaskan kaidah Islam.

Saran

Penelitian ini berfokus pada analisis potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran termasuk ragam industri kreatif yang dimiliki dan berkembang di masyarakat sebagai nilai dan daya tarik bagi pengembangan pariwisata Syariah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan masih dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini sehingga mendapatkan gambaran utuh mengenai pengembangan pariwisata Syariah di Kabupaten Pangandaran. Penelitian lanjutan diarahkan terutama pada beberapa kajian yaitu, kebijakan pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait pariwisata khususnya pariwisata Syariah, peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan pariwisata Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Riansyah, A.O. Potensi Pariwisata Syariah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Dipenogoro.
- [2] Sahida, W., Rahman, S.A., Awang, K., & Man, Y.C. (2011) The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma. The 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences. 17, pp. 138-142. Singapore. IACSIT Press.
- [3] Sapudin, A., Adi, F., Sutomo (2014) Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional. Bogor. Magister Manajemen Syariah. IPB.
- [4] Sucipto, (2014) Peluang Wisata Syariah. Mahaka Group. Dipetik Agustus 10, 2019. Dari Republika online: <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/08/11na4ooc19-peluang-wisata-syariah>.
- [5] Supangkat, Subono Harso, Biranul Anas Zaman, Togar, Simatupang (2008) Industri Kreatif untuk Kesejahteraan Bangsa. Bandung. Inkubator Industri dan Bisnia.
- [6] Pearce, D. (1989). Tourist Development. Essex. Longman Group UK. Pendit, Nyoman S. 2006. Ilmu Pariwisata. Jakarta. Pradnya Paramita
- [7] Prastowo. (2011). Memahami Model Penelitian. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- [8] Reisinger, Y. & Turner, L.W. (2003). Cross Cultural Behaviour in Tourism. Concepts and Analysis. Oxford. Butterworth Heinemann.
- [9] Kuncoro, Mudrajad, 2005. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta. Erlangga.
- [10] Moira, p., Mylonopoulos, D & Kontoudaki, A. (2012) The Management of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry. International Journal of Culture and Tourism Research, 5 (1), 129-140.
- [11] Riansyah, A.O. Potensi Pariwisata Syariah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Dipenogoro.
- [12] Sedarmayanti. 2014. Manajemen Strategi. Bandung. PT rafika Aditama.
- [13] Siagian, P.S. (2007). Manajemen Stratejik. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- [14] Sucipto, (2014) Peluang Wisata Syariah. Mahaka Group. Dipetik Agustus 10, 2019. Dari Republika online: <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/08/11na4ooc19-peluang-wisata-syariah>.
- [15] Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta. Gava Media.
- [16] Wahab, Salah. (1992). Pemasaran Pariwisata. Jakarta. Pradnya Paramita



-
- [17] Yoeti Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta. Pradnya Paramita
- [18] Jurnal Nasional Pariwisata, Volume 5 Nomor 3, Desember 2013
- [19] Jurnal Pariwisata, Volume 1, Nomor 2, September 2014
- [20] Ross, GF. (1998). The Psychology of Tourism. Melbourne. Hospitality Press.
- [21] Triana (2014) Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di DIY”.
- [22] Wahab, Salah. (1992). Pemasaran Pariwisata. Jakarta. Pradnya Paramita
- [23] Yoeti Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta.
- [24] Pradnya Paramita Jurnal Nasional Pariwisata, Volume 5 Nomor 3, Desember 2013 Jurnal Pariwisata, Volume 1, Nomor 2, September 2014
- [25] Subsektor Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf .kemenparekraf.go.id: <https://bit.ly/3kd0seB>